

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anindarini, Grita dan Margaretha Quina, 2018, *Seri Lembar Informasi Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia*, ICEL, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1995, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2018, *Katalog Statistik Listrik 2012-2017*, Penerbit Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.

Dankers, Hageenars dan Irving Swerdlow, 1975, *The Public Administration of Economic Development*, Praeger Publishers, New York.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua)*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Griffin, Ricky W., 1990, *Management*, Houghton Mifflin Company, Boston.

Islamy, M. Irfan, 1992, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lasswell, Harold D. dan Abraham Kaplan, 1970, *Power and Society*, Yale University Press, New Heaven.

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.

- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Marsudi, Djiteng, 2005, *Pembangkitan Energi Listrik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, dan Inggris*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.
- S., Salim H., 2014, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Swerdlow, Irving, 1975, *The Public Administration of Economic Development*, Praeger Publishers, New York.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.
- Zuhal, 1994, *Ketenagalistrikan Indonesia*, PT Ganeca Prima, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Azed, Abdul Bari, “Manajemen Arsip dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Indonesia Ke-51, Maret 2001.
- Aziza, Rosida Nur, Meilia Nur Indah Susanti, Abdurrasyid, Puji Catur Sispraptini, “Perancangan Animasi Pembangkit Listrik Biomassa dan Sampah sebagai Bagian dari Listrik Kerakyatan untuk Media Pembelajaran”, *Jurnal Ilmiah Figo*, Vol. X, No. 1, Mei 2018.
- Butt, Simon dan Fritz Edward Siregar, “Analisis Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 1, Februari 2013.

Rhiti, H. dan Y. Sri Pudyatmoko, “Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, Juni 2016.

Ristriawan, Hendar dan Dewi Kania Sugiharti, “Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme *Checks and Balances System*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, September 2017.

Sembiring, Julius, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria”, *Jurnal Bhumi*, Vol. 2, No. 2, November 2016.

Setiawan, Hendra, “Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas I Samarinda”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013.

Tarigan, Jefri Porkonanta, “Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.

Yurista, Ananda Prima, “Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 3, Desember 2016.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Setiawan, Heru, 2011, *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

W., Sri Hartina, 2017, *Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Restrukturisasi Tarif Tenaga Listrik di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*, Tesis, Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah

Binoto, Maju dan Yulianto Kristiawan, “Peramalan Energi Listrik yang Terjual dan Daya Listrik Tersambung pada Sistem Ketenagalistrikan untuk Jangka Panjang di Solo Menggunakan Model *Artificial Neural Network*”, *Makalah, Prosiding Snatif Ke-2 Tahun 2015*, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2015.

Liandana, Made dan Made Agus Wirahadi Putra, “Sistem Otomatisasi Rumah untuk Mengatur Perangkat Listrik pada Saat Beban Puncak”, *Makalah*,

Konferensi Nasional Sistem dan Informatika, STMIK STIKOM, Bali, 9-10 Oktober 2015.

E. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kebijakan>, diakses pada 16 Februari 2019.

Febriana, Ramdan, “Pembagian Sistem Penyaluran Tenaga Listrik”, <https://www.warriornux.com/pembagian-sistem-penyaluran-tenaga-listrik/>, diakses pada 16 Januari 2019.

Mustaqim, Abid Alim, “Pembangkitan Energi Listrik”, https://www.academia.edu/24828307/PEMBANGKITAN_ENERGI_LISTRIK, diakses pada 16 Januari 2019.

Zakky, “Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Secara Umum”, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-manajemen/>, diakses pada 28 Februari 2019.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530).

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Memorandum of Understanding on The Asean Power Grid* (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 208).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43).

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibacakan pada hari Rabu, 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibacakan pada hari Selasa, 13 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibacakan pada hari Rabu, 14 Desember 2016.